

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Awal abad ke-20 merupakan satu periode penting dalam Sejarah Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah gerakan perempuan. Penerapan Politik Etis oleh pemerintah kolonial Belanda pada periode itu, yang terutama melalui pembangunan institusi pendidikan modern, telah menciptakan satu masyarakat baru yang sangat akrab dengan unsur-unsur modernitas.<sup>1</sup> Hal demikian itulah yang terjadi dalam gerakan perempuan di Indonesia. Mereka menjadi bagian dari gerakan bangsa Indonesia secara umum yang menghendaki adanya kemajuan.

Gerakan perempuan di Indonesia pada awal abad ke-20, tidak terlepas dari gerakan sosial internasional yang bertujuan emansipasi, nasionalisme, serta kemerdekaan dari kekangan kolonialisme. Para perempuan dalam organisasi perempuan berjuang bersama dengan gerakan nasionalisme untuk menghilangkan ketidak-adilan dalam sistem kolonial.<sup>2</sup> Pada masa awal pergerakan Indonesia, pergerakan perempuan lebih terfokus pada perjuangan untuk mempertinggi kedudukan sosial. Dalam perkembangannya pergerakan perempuan ini tidak hanya menentang ketidakadilan sosial dari sistem kolonial saja, tetapi juga masalah perkawinan paksa dan praktek poligami.<sup>3</sup> Problem itulah yang mengawali pertumbuhan organisasi perempuan pada awal abad ke-20.

Pergerakan Perempuan di Indonesia memiliki perbedaan dengan feminisme di Barat. Feminisme di dunia Barat bertujuan untuk melawan usaha para lelaki, dan agar dapat mencapai kepentingan-kepentingan yang berkaitan

---

<sup>1</sup> Jajat Burhanudin dan Oman Fathurahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 2.

<sup>2</sup> Mayling Oey-Gardiner, *Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 18.

<sup>3</sup> Cora Vreede-De Stuers, terj. Elvira Rosa, dkk., *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*, (Depok: Komunitas Bambu, 2008), hlm. xiii.

dengan hak-hak perempuan. Sedangkan pergerakan perempuan di Indonesia pada tahap awal lebih mengarah kepada usaha-usaha untuk memajukan perempuan di bidang pendidikan, sosial, dan politik; sebagai usaha untuk melawan penjajahan bangsa Belanda dengan kesadaran nasional untuk bersatu serta meraih kemerdekaan yang hakiki.

Pergerakan perempuan di Indonesia tidak harus sepenuhnya mengadopsi konsep-konsep Barat, khususnya yang berkenaan dengan emansipasi. Dalam ajaran Islam, baik yang tercantum dalam al-Qur'an maupun hadits sudah mengatur hubungan manusia dengan Sang Khalik (*hablumminallah*) dan mengatur hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannas*), sangat kaya akan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, kesetaraan manusia, serta pesan-pesan moral mengenai pentingnya pemuliaan terhadap harkat dan martabat manusia. Kesemuanya itu pada esensinya sangat akomodif terhadap gagasan emansipasi.

Salahsatu dari organisasi perempuan berdasarkan keagamaan yang mempunyai peranan penting adalah Aisyiah. Aisyiah dimulai sejak KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, yang menyadari perlunya bantuan perempuan dalam menyelenggarakan sejumlah kursus mengenai perintah agama. Pada tahun 1914, perempuan Muhammadiyah dihimpun dalam perkumpulan bernama Sopo Tresno, dan baru pada 1917 berubah nama menjadi Aisyiah, dengan Nyai Ahmad Dahlan sebagai ketuanya.<sup>4</sup>

Aisyiah merupakan organisasi perempuan yang didirikan sebagai jawaban atas pentingnya perempuan turut berkiprah di wilayah-wilayah sosial kemasyarakatan. Gerakan perempuan Muhammadiyah atau Aisyiah ini lahir pada tahun 1917 dan hadir saat situasi kondisi masyarakat dalam keterbelakangan, kemiskinan, tidak terdidik, awam dalam pemahaman keagamaan, dan berada dalam zaman penjajahan Belanda. Kini gerakan perempuan Indonesia menghadapi masalah dan tantangan yang kompleks, baik dalam aspek keagamaan, ekonomi, politik, maupun sosial-budaya. Dalam

<sup>4</sup> A.B. Lopian, dkk., *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Masa Pergerakan Kebangsaan*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm. 368.

menghadapi tantangan yang kompleks tersebut, maka gerakan Aisyiyah dituntut untuk melakukan revitalisasi baik dalam pemikiran maupun orientasi praktis yang mana gerakannya mengarah pada pembebasan, pencerahan, dan pemberdayaan menuju kemajuan perempuan muslim dalam berbagai bidang.

Sejak berdirinya Aisyiyah pada tahun 1917 hingga 1928, fokus utama gerakan Aisyiyah adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat yang khususnya perempuan terhadap berbagai masalah yang menjadi tujuan utama berdirinya organisasi ini. Adapun tujuan utamanya adalah memperkenalkan pandangan bahwa Islam menganggap perempuan setara dengan laki-laki, baik dalam ranah keagamaan maupun sosial. Aisyiyah juga menganjurkan pembaruan budaya dengan menggalakkan penafsiran ulang terhadap pandangan yang menganggap perempuan sebagai pihak inferior.<sup>5</sup>

Aisyiyah berkembang semakin pesat dan menemukan bentuknya sebagai organisasi wanita modern. Dengan demikian, Aisyiyah menjadi gerakan wanita Islam yang mendobrak kebekuan feodalisme dan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat pada masa itu, serta sekaligus melakukan advokasi pemberdayaan kaum perempuan.

Aisyiyah seterusnya berkembang seiring dengan perkembangan Muhammadiyah. Keduanya berjuang bersama berdampingan untuk kemajuan umat. Hingga perkembangannya itu tidak hanya mencangkup daerah wilayah tempat berdirinya saja, tetapi meluas hingga hampir ke seluruh pelosok negeri, termasuk wilayah Jawa Barat yang menjadi fokus penelitian penulis.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peran Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat dalam Pemberdayaan Politik Perempuan, kemudian dilakukan analisis dari perbandingan keduanya yang dilihat dari aspek pemikiran dan pergerakannya. Penulis mengangkat permasalahan tersebut untuk dijadikan sebuah karya berupa tesis yang berjudul:

<sup>5</sup> Rof'ah, *Posisi dan Jati Dri Aisyiyah: Perubahan dan Perkembangan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), hlm. 31.

## **Peran Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat dalam PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN (1999-2019)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis pun merumuskan permasalahan berupa beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana awal pendirian dan arah pengembangan Organisasi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat?
2. Bagaimana pandangan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat tentang Kesetaraan Gender?
3. Bagaimana peran Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat dalam Pemberdayaan Politik Perempuan (1999-2019)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjawab semua permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui awal pendirian dan arah pengembangan Organisasi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat.
2. Untuk memahami pandangan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat tentang Kesetaraan Gender.
3. Untuk mengetahui peran Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat dalam Pemberdayaan Politik Perempuan (1999-2019).

### **D. Manfaat Penelitian.**

Dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat mendatangkan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis, khalayak umum, dan khazanah ilmu pengetahuan. Berikut ini adalah kegunaannya:

#### **1. Kegunaan secara teoritis**

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan pemahaman mengenai sejarah pergerakan dari organisasi perempuan. Selain itu

juga menjadi sebuah nilai tambah khazanah pengetahuan ilmiah dalam bidang kesejarahan di Indonesia.

## **2. Kegunaan secara praktis**

*Bagi umum*, Hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dalam mengkaji ilmu kesejarahan, khususnya tentang pandangan dan gerakan organisasi perempuan dalam upaya memperjuangkan kemajuan.

*Bagi penulis*, Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut bilamana masih terdapat kekurangan karena terkendala keterbatasan dari segi sumber dan pemahaman penulis.

## **E. Kerangka Pemikiran.**

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan pendekatan dan teori yang membantu mempermudah peneliti dalam memahami objek yang akan dikaji. Studi ini pada dasarnya adalah studi sejarah, yakni studi yang sifatnya diakronik yaitu memanjang dalam waktu dan terbatas dalam ruang. Namun jika permasalahannya berkaitan dengan perkembangan sosial maka dianjurkan pula memakai pendekatan ilmu sosial, yaitu pendekatan sinkronis yang meluas dalam ruang dan terbatas dalam waktu.<sup>6</sup> Dua pendekatan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat saling melengkapi dalam penulisan sejarah.

Penelitian sejarah memerlukan teori sebagai alat untuk menganalisa permasalahan yang ada, dalam hal ini penulis berdasarkan pada Teori Progresif Linier Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berafiliasi dalam tiga aliran filsafat sejarah dan salah satunya adalah aliran sejarah sosial. Aliran ini berpendapat bahwa fenomena-fenomena sosial secara dapat ditafsirkan, dan teori-teorinya dapat diikhtisarkan dari fakta-fakta sejarah.<sup>7</sup>

Penelitian sejarah juga memerlukan ilmu bantu dalam melihat gerak perkembangannya karena bersifat multidimensi. Sehingga penelitian dibantu oleh ilmu sosial yang dapat mengungkapkan segi-segi sosial dari peristiwa sejarah.

<sup>6</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001), hlm. 26.

<sup>7</sup> Moeflich Hasbullah dan Dedi Supriyadi, *Filsafat Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 263.

Pendekatan ilmu sosial pun dapat dipakai sebagai upaya menginterpretasikan kerangka penjelasan kausal terhadap perilaku-perilaku sosial dalam perjalanan sejarah. Jika pendekatannya adalah ilmu sosial maka diperlukan juga teori ilmu sosial untuk mengungkap peristiwa sosial yang ada. Dalam penelitian ini penulis pun menggunakan teori feminis.

Teori feminis merupakan suatu teori yang membahas tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia ditinjau dari perspektif perempuan. Teori feminisme ini memusatkan perhatiannya pada tiga hal, yaitu: *Pertama*, objek utama kajiannya adalah situasi dan pengalaman perempuan dalam masyarakat; *kedua*, membicarakan perempuan sebagai subjek utama dalam proses kajiannya; dan *ketiga*, teori ini kritis dan aktif membela perempuan dengan berusaha menghasilkan dunia yang lebih baik untuk perempuan pada khususnya dan manusia pada umumnya.<sup>8</sup>

Teori feminis mengembangkan suatu sistem ide-ide tentang kehidupan manusia yang mencirikan perempuan sebagai objek dan subjek, pelaku dan yang mengetahui. Feminisme mempunyai suatu sejarah yang sama panjangnya dengan subordinasi perempuan, perempuan telah disubordinasi nyaris selalu dan dimanamana. Hingga akhir 1700-an tulisan feminis semakin lestari sebagai tetesan protes yang kecil namun gigih. Sejak saat itu hingga sekarang, tulisan feminis telah menjadi gelombang pasang karya kritis yang terus bertumbuh.<sup>9</sup>

Fatima Mernissi dikenal sebagai salah satu penulis perempuan yang berasal dari Maroko. Dia belajar politik di Universitas Brandeis di Sorbonne dan berhasil meraih gelar doctor. Ia begitu tertarik mempelajari Islam dan berusaha mewujudkan dalam kehidupan modern. Gerakan feminisme Islam yang diperjuangkan Fatima Mernissi adalah satu usaha untuk mengubah pola kehidupan masyarakat terutama bagi kaum perempuan agar mendapatkan haknya secara adil sebagaimana terdapat dalam keluarga dan masyarakat sehingga diperoleh suasana kehidupan yang berkemajuan, kaum perempuan memperoleh hak mengenyam pendidikan dan

<sup>8</sup> Ida Hidayatul Aliyah, dkk., 2018, "Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah", *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 1 (2), hlm. 141.

<sup>9</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2012) hlm. 847.

menguasai ataupun mengerjakan bidang-bidang lainnya. Adapun titik tolak pemikiran feminisme Fatimah Mernissi berdasarkan atas pemahaman (penafsiran ulang) terhadap teks-teks keagamaan yang tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>10</sup>

Salah seorang feminis muslimah lainnya yang berupaya melakukan kritik konstruktif sekaligus rekonstruksi secara holistik terhadap pelbagai persoalan perempuan, khususnya peran kepemimpinan politik kaum perempuan di ruang publik adalah Siti Musdah Mulia. Dia bukan hanya melakukan kritik konstruktif terhadap interpretasi keagamaan yang hanya menempatkan perempuan dalam wilayah domestik, tetapi ia juga menawarkan paradigma pendidikan dan pembudayaan kepemimpinan politik yang berpihak pada kaum perempuan, serta mengkritisi kebijakan publik yang tidak memihak dan tidak menampung aspirasi peran politik perempuan.<sup>11</sup>

Bagi Musdah, untuk merubah konstelasi kehidupan masyarakat yang berpihak pada gender equality dalam tataran politik bagi perempuan tidak cukup jika hanya dengan melakukan dekonstruksi penafsiran terhadap doktrin-doktrin tekstual yang terdapat dalam Islam, yakni Qur'an dan Sunnah. Menurutnya, di samping dekonstruksi penafsiran terhadap doktrin-doktrin fundamental Islam, diperlukan pula gerakan secara praktis dalam ranah pendidikan, kebudayaan, dan kebijakan publik yang berpihak kepada kaum perempuan.<sup>12</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka ini dilakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi atas karya orang lain yang telah ada. Penulis melakukan penelusuran dan menggali informasi seputar masalah yang akan diteliti dari data yang telah ada untuk kemudian dikembangkan. Penulis pun menemukan beberapa karya yang telah ada dan berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya sebagai berikut:

<sup>10</sup> Widyastini, 2008, "Gerakan Feminisme Islam dalam Perspektif Fatimah Mernissi", *Jurnal Filsafat*, 18 (1), hlm. 66-67.

<sup>11</sup> Zapulkhan, 2015, "Rekonstruksi Peran Politik Perempuan Menurut Musdah Mulia", *Jurnal Al-Tahrir*, 15 (2), hlm. 311.

<sup>12</sup> Zapulkhan, *Rekonstruksi Peran Politik ...*, hlm. 312.

Buku karya Lies M. Marcoes-Natsir dan Johan Hendrik Meuleman yang berjudul *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, buku ini merupakan kumpulan makalah yang disajikan pada seminar yang diselenggarakan oleh Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) di pusat kebudayaan Belanda “Erasmushuis” di Jakarta yang dilaksanakan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Desember 1991. Dari 29 makalah yang diketengahkan selama seminar baik oleh pemakalah utama maupun pembanding, sebagian besar telah berwujud menjadi tulisan yang dimuat dalam buku ini. Isi teks yang disajikan di buku ini tak mengalami perubahan mendasar dengan isi makalah yang disajikan pada seminar.

Buku yang berjudul *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan* yang disunting oleh Jajat Burhanudin dan Oman Faturahman. Hal yang menjadi pokok pembahasan dalam buku ini adalah berkaitan dengan perkembangan, perubahan, dan perdebatan tentang perempuan di Indonesia, yang semuanya dihubungkan dengan Islam. Dalam buku ini, awal abad ke-20 sengaja dilihat sebagai periode pertama ketika kaum perempuan mulai memasuki wacana social-intelektual Islam Indonesia dan yang terpenting dari masa tersebut adalah sebagai tanda kaum perempuan mulai merumuskan diri mereka di tengah arus perubahan social-budaya masyarakat Indonesia. Buku ini bertujuan untuk menghadirkan satu rekonstruksi historis pemikiran para sarjana Muslim Indonesia tentang perempuan yang terus mengalami perubahan.

Buku yang berjudul *Wacana Gerakan Perempuan Kontemporer* yang ditulis dan diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Aisyiyah. Buku ini di dalamnya memuat tentang pemberdayaan perempuan yang harus dimulai dengan mengikis konsepsi, persepsi dan pemahaman tentang perempuan yang didasarkan budaya yang menghambat pemberdayaan perempuan itu sendiri. Dalam memperbaiki konsepsi, persepsi, dan pemahaman tentang perempuan harus sejalan dengan ajaran Islam secara tepat di mana Islam menggariskan tata aturan pembentukan masyarakat secara utuh dan bulat, setiap unsurnya laki-laki dan perempuan mempunyai peranan yang sama-sama penting. Peranannya tidak saling mengatasi, tidak saling menguasai, tetapi sesuai dengan kondisi esensialnya masing-masing dengan saling



melengkapi dan menyempurnakan demi tercapainya masyarakat yang berbahagia segenap warganya. Hal ini untuk menghilangkan dan menetralsir hambatan psikologis, kltural, dan teknik untuk memudahkan jalan peningkatan peranan perempuan dalam segala aspeknya.

Penelitian berikutnya adalah buku yang berjudul *Aisyiyah: Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Islam* yang ditulis dan diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Aisyiyah. Buku ini membahas tentang Aisyiyah sebagai organisasi perempuan yang bergerak dalam usaha peningkatan martabat dan kesadaran perempuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan tulisan-tulisan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis angkat berbeda dengan tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian penulis lebih memfokuskan kepada satu wilayah yaitu Jawa Barat berdasarkan domisili penulis. Meskipun telah ada sebelumnya yang telah meneliti tentang Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat, tapi dalam cangkupan dan kurun waktu yang berbeda. Penulis berharap penelitian ini dapat melengkapi studi-studi yang telah diadakan oleh para peneliti sebelumnya, yang pada hakekatnya bersifat melengkapi atau informasi baru yang akan menambah sumber kepustakaan sejarah.

## **G. Metode Penelitian**

Sebagaimana mestinya dalam mengkaji sejarah, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Metode Penelitian Sejarah ialah sebuah penelitian yang tujuannya mendeskripsikan dengan menganalisis peristiwa-peristiwa masa lampau yang bertumpu pada empat langkah, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

### **1. Heuristik**

Tahapan Heuristik merupakan tahap awal dalam melaksanakan penelitian sejarah yaitu mengumpulkan sumber yang berkaitan dengan judul penelitian baik berupa benda, tulisan maupun lisan yang didapat dari perpustakaan, arsip, museum, dll. Nina Herlina Lubis mengemukakan bahwa “Pada tahapan menentukan sumber informasi, bukan tidak mustahil bahwa kita telah dapat menghimpun sejumlah

<sup>13</sup> Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 103.

sumber berupa daftar bacaan atau daftar nama informan beserta tempat di mana sumber itu berada. Dengan demikian kita telah tiba pada saat mulainya penelitian yang sesungguhnya”.<sup>14</sup> Dari data yang terhimpun, kemudian kita kelompokkan mana yang dikategorikan sebagai sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang didapat dari pelaku ataupun saksi yang sezaman dalam suatu peristiwa itu. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak sezaman tetapi mengetahui peristiwa tersebut sehingga bisa dimintai keterangan ataupun pendapatnya.

Pada penelitian ini penulis telah mendapatkan beberapa sumber yang berkaitan dengan judul. Sumber-sumber tersebut penulis dapatkan dari Kantor Aisyiyah Pimwil Jabar, Kantor KPU Jawa Barat, Kantor DPRD Jawa Barat dan beberapa perpustakaan baik perpustakaan pemerintah seperti BAPUSIPDA, perpustakaan lembaga seperti Perpustakaan UIN Bandung, maupun perpustakaan pribadi seperti Perpustakaan Batu Api. Jika sumber telah terkumpul, maka dilakukan pengklasifikasian sumber. Sehingga akan diketahui mana saja yang termasuk sumber primer ataupun sumber sekunder. Setelah dilakukan pengklasifikasian sumber, maka bisa disebutkan sumber yang dikategorikan sebagai *Sumber Primer*, yaitu diantaranya:

a. Sumber Tertulis

1) Arsip

- a) Surat keputusan pengesahan organisasi Wilayah Aisyiyah Jawa Barat tahun 1988
- b) Surat keputusan musyawarah pimpinan wilayah II Aisyiyah Jawa Barat periode 2005-2010
- c) Surat keputusan musyawarah pimpinan wilayah I Aisyiyah Jawa Barat periode 2005-2010
- d) Surat keputusan pimpinan Pusat Aisyiyah tentang penetapan Aisyiyah sebagai organisasi otonom tahun 2009
- e) Laporan Musyawarah Pimpinan Wilayah II Aisyiyah Jawa Barat periode

<sup>14</sup>Nina Herlina, *Metode Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2008), hlm. 91.

- f) 2005-2010, tahun 2010.
  - g) Surat keputusan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat tahun 2010
  - h) Susunan anggota Pimpinan wilayah Aisyiyah Jawa Barat 2015-2020
- 2) Koran dan Majalah
- a) Suara Aisyiyah, April 2001 “*Tantangan bagi Wanita Karir*” edisi no 4 tahun ke-78, Yogyakarta.
  - b) Suara Aisyiyah, Desember 2001 “*Tantangan Profesionalisme Aisyiyah*” edisi no 12 tahun ke-78, Yogyakarta.
  - c) Suara Aisyiyah, Agustus 2002 “*Menggalang Nilai Juang '45 Dalam Menghadapi Sidang Tahunan MPR: Menyikapi Krisis Multidimensional*” edisi no 8 tahun ke-79, Yogyakarta.
  - d) Suara Aisyiyah, April 2003 “*Derap Langkah Kartini Dalam Awal Abad 21*” edisi no 4 tahun ke-80, Yogyakarta.
  - e) Suara Aisyiyah, Juni 2003 “*Pendidikan dalam Keluarga*” edisi no 6 tahun ke-80, Yogyakarta.
  - f) Suara Aisyiyah, April 2012 “*Mengenal Sosok Raden Ajeng Kartini: Membedik Wanita Utama Indonesia yang Mendunia*” edisi no 4 tahun ke-89, Yogyakarta.
  - g) Suara Aisyiyah, November 2012 “*Jihad Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*” edisi no 11 tahun ke-89, Yogyakarta.
  - h) Suara Aisyiyah, Mei 2017 “*Memuliakan Masyarakat dengan Pendidikan yang Mencerahkan*” edisi no 5 tahun ke-94, Yogyakarta.
  - i) Rosmiati, *Kontroversi Hak-hak Politik Wanita*, 10 April 2003, dalam Pikiran Rakyat, Bandung.
  - j) Setia Permana, *Demokratisasi Peran Politik Perempuan*, 21 April 2003 dalam Pikiran Rakyat, Bandung.
  - k) Adjeng, *Parlemen Masih Butuh Banyak Wanita*, 15 Agustus 2006, dalam Pikiran Rakyat, Bandung.
  - l) Neni Utami Adiningsih, *Politik Perempuan*, 08 Maret 2011, dalam Pikiran Rakyat, Bandung.

- m) Diah Fatma Sjoraida, *Pilkada Serentak & Peran Politik Perempuan*, 25 Juni 2015, dalam *Pikiran Rakyat*, Bandung.
- n) Mahi M Hikmat, *Peluang Politik Perempuan*, 13 September 2018, dalam *Pikiran Rakyat*, Bandung.
- o) Antik Bintari, *Perempuan dalam Politik*, 19 Desember 2018 dalam *Pikiran Rakyat*, Bandung.
- p) Dewiyatini, *Perempuan Sulit Berpartisipasi*, 20 Desember 2018 dalam *Pikiran Rakyat*, Bandung.

3) Buku

- a) Buku panduan Musyawarah Pimpinan Wilayah I Aisyiyah Jawa Barat, *Gerakan Al-Maun untuk Kemajuan Masyarakat Jawa Barat*, Bandung: Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat, 2013.
- b) Pimpinan Pusat Aisyiyah, "*Aisyiyah*", Yogyakarta: Pimpinan Pusat Aisyiyah, 1980.
- c) Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Aisyiyah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Aisyiyah, tt.
- d) Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Aisyiyah Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Aisyiyah, tt.
- e) Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Wacana Gerakan Perempuan Kontemporer*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Aisyiyah, 2000.

**b. Sumber Lisan**

- 1) Ibu Ia Kurnia, selaku Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat Periode 2015-2020;
- 2) Ibu Heni Nuraeni, selaku Ketua II Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat Periode 2015-2020;
- 3) Ibu Tia Muthia Umar, calon DPD RI Dapil Jawa Barat periode 2019-2024;
- 4) Ibu Leny Oemar, calon DPRD Jawa Barat fraksi PKS periode 2019-2024.

**c. Sumber Benda**

- 1) Foto
  - a) Foto Bangunan Kantor Aisyiyah Pimpinan Wilayah Jawa Barat
  - b) Foto Musyawarah Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat tahun 2015

- c) Foto Ketua Aisyiyah Pimpinan Wilayah Jawa Barat dari tahun 1965-2015
- d) Foto Kegiatan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat periode 2015-2020

2) Audiovisual

- a) Televisinet, 2013, *Gubernur Jawa Barat Menghadiri Muspinwil ke 1 Aisyiyah*, dalam <http://www.youtube.com>, diakses tanggal 20 Juni 2020.
- b) Arfah Reza, 2015, *Dokumenter Milad Aisyiyah 101 Bandung*, dalam <http://www.youtube.com>, diakses tanggal 20 Juni 2020.

Sementara itu terdapat beberapa sumber yang termasuk ke dalam sumber sekunder atau sumber kurang kuat sebagai sumber pendukung yang relevan, yaitu sebagai berikut:

1) Buku

- a) Jajat Burhanudin dan Oman Fathurahman. 2004. *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- b) Cora Vreede De Stuers. Terj. Elvira Rosa, dkk. 2008. *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Depok: Komunitas Bambu.
- c) A.B. Lopian dkk. 2011. *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Masa Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- d) Mayling Oey-Gardiner. 1996. *Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- e) Rof'ah. 2016. *Posisi dan Jati Diri Aisyiyah: Perubahan dan Perkembangan*.

2) Jurnal

- a) Ida Hidayatul Aliyah, dkk., 2018, "Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah", *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 1 (2).
- b) Widyastini, 2008, "Gerakan Feminisme Islam dalam Perspektif Fatimah Mernissi", *Jurnal Filsafat*, 18 (1).
- c) Zaprul Khan, 2015, "Rekonstruksi Peran Politik Perempuan Menurut Musdah Mulia", *Jurnal Al-Tahrir*, 15 (2).

3) Internet

- a) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, *AISYIYAH: Mencetak jejak sejarah*, dalam [arsip.muhammadiyah.or.id](http://arsip.muhammadiyah.or.id), diakses pada tanggal 10 November 2020.

- b) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 1997. *Semilir Aisyiyah di Jawa Barat*. Dalam <http://jabar.muhammadiyah.or.id>. Diakses pada tanggal 10 November 2020.
- c) Chamamah Soeratno. 2010. *Aisyiyah terus tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat*. Dalam <http://republika.co.id>. Diakses pada tanggal 10 November 2020.
- d) Hasanul Rizqa. 2019. *Sekilas Sejarah Lahirnya 'Asiyiyah*. Dalam <http://republika.co.id>. Diakses pada tanggal 10 November 2020.
- e) Nurul Asfiah. *Gerakan Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*. Dalam <http://www.lp3a.umm.ac.id>. Diakses tanggal 12 Februari 2019.
- f) Tafsir. *Pandangan Muhammadiyah tentang Perempuan*. Dalam <http://tarjih.muhammadiyah.or.id>. Diakses pada tanggal 15 November 2020.
- g) Wawan Gunawan. *Membaca Kepemimpinan Perempuan dalam RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan Perspektif Muhammadiyah*. Dalam <http://media.neliti.com>. Diakses pada tanggal 15 November 2020.

## 2. Kritik

Setelah data atau sumber terkumpul maka tahapan selanjutnya adalah mengkritik sumber agar dipastikan keaslian dan keshahihannya. Seperti dikemukakan oleh Kuntowijoyo yang dikutip kembali oleh Nina H Lubis, adalah sebagai berikut:

Sumber yang telah ditemukan melalui tahapan heuristik itu, harus diuji dahulu. Pengujian ini dilakukan melalui kritik. Setelah kita mengetahui secara tepat topik kita dan sumber sudah kita kumpulkan, tahap yang berikutnya ialah verifikasi, atau kritik sejarah, atau keabsahan sumber. Verifikasi itu ada dua macam yaitu meneliti otentisitas sumber, atau keaslian sumber, yang disebut kritik eksternal, dan meneliti kredibilitas yang disebut kritik internal.<sup>15</sup>

### a. Kritik Ekstern

<sup>15</sup>Nina Herlina, *Metode Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2008), hlm. 24.

Kritik Ekstern dilakukan untuk menentukan sejauh mana otentisitas (Keaslian Sumber). Kritik Ekstern terkait aspek luar atau kondisi fisik dari sebuah sumber. Dalam tahapan ini, kita memastikan sumber itu dikehendaki atau tidak dengan cara menentukan keaslian dan keutuhannya.

Pertama, untuk menentukan sumber itu asli atau tidak yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Waktu ditulis dan dikeluarkannya sumber: titik tidak sebelumnya dan titik tidak sesudahnya;
- 2) Bahan atau materi sumber: kertas atau tinta;
- 3) Identifikasi tulisan tangan, tanda tangan, cap, jenis huruf ataupun ejaan.

Kedua, untuk menentukan keutuhan sumber maka yang harus dilakukan adalah kritik teks. Dengan begitu, bisa ditemukan adanya redaksi yang hilang, redaksi yang pertama, dan redaksi yang diulang-ulang.

Dari sekian sumber yang terhimpun terdapat diantaranya sumber yang bisa dijamin keotentisitasannya, seperti Surat Keputusan, Surat kabar “Suara Aisyiyah” dan buku-buku terbitan Pimpinan Pusat atau Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat. Dilihat dari tahun terbitnya, sangat dekat dan tidak begitu jauh dengan peristiwa. Kemudian dari segi kertasnya, sudah nampak agak kusam. Begitu pun dengan tulisannya yang sudah tidak terlalu tajam dilihat. Dengan begitu, dapat dipastikan keaslian dari sumber tersebut.

Selanjutnya dilakukan kritik teks untuk memastikan keutuhannya. Surat Keputusan, Surat kabar “Suara Aisyiyah” dan buku-buku terbitan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah Aisyiyah itu jelas dari tangan pertama yaitu ketua ataupun anggota dari organisasi tersebut yang terlibat secara langsung baik secara pemikiran ataupun gerakan.

#### **b. Kritik Intern**

Kritik Intern dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kredibilitas (Kesahihan Sumber). Dalam tahapan ini ditentukan bisa dipercaya atau tidaknya suatu sumber yang diperoleh, yaitu dengan cara melakukan langkah-langkah berikut ini:

- 1) Penilaian Intrinsik;

- 2) Menyoroti pengarang atau penulis atau pelaku atau saksi dari sumber yang diperoleh.
- 3) Memastikan mampu tidaknya menyampaikan kesaksian yang benar, yaitu dengan cara melihat hal-hal berikut:
  - a) Kedekatan antara pelaku dengan saksi terkait peristiwa tersebut;
  - b) Keahlian dari pelaku atau saksi tersebut;
  - c) Mau tidaknya menyampaikan kebenaran atau kesaksiannya.
  - 4) Melakukan Komparasi (saling membandingkan antar sumber) dan Korborasi (saling mendukung antar sumber).

Dari beberapa sumber yang terkumpul, baik yang ditulis oleh pelaku maupun saksi. Ada beberapa sumber yang ditulis ataupun disampaikan langsung oleh pelaku ataupun saksi yang terlibat, seperti surat-surat keputusan, surat kabar dan buku-buku yang diterbitkan langsung oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat. Sumber-sumber tersebut jelas dapat dipercaya karena tokoh yang bersangkutan terlibat secara langsung dalam peristiwa, sehingga bisa dipastikan dapat menyampaikan pengalaman dan kesaksiannya dengan benar.

Selanjutnya untuk bisa lebih memastikan dapat dipercaya atau tidaknya suatu sumber, maka dilakukan komparasi (membandingkan) dan korborasi (mendukung) antar sumber. Dari beberapa sumber yang didapat terdapat perbedaan pendapat antar sumber, biasanya yang ditemukan adalah perbedaan waktu peristiwa. Selain itu, terkadang ditemukan kecenderungan memihak suatu tokoh dan ormas ataupun parpol tertentu. Sehingga perlu dilakukan komparasi dan korborasi untuk saling membandingkan dan mendukung antar sumber, supaya bisa lebih dipastikan kredibilitas sumber-sumber tersebut.

### **3. Interpretasi**

Nina Herlina mengemukakan bahwa “Sumber yang diperoleh melalui tahapan heuristik, setelah melalui kritik maka lahirlah fakta. Sesuatu fakta yang dibiarkan berdiri mandiri, atau sejumlah fakta yang disusun berurut sekalipun secara kronologis, belumlah merupakan kisah sejarah. Antara fakta dan kisah



sejarah ada suatu tahapan yang harus ditempuh yaitu tahapan interpretasi”.<sup>16</sup> Dalam tahapan ini dilakukan analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan) dari fakta-fakta yang telah lolos tahapan kritik ekstern maupun intern.

Analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori lalu disusunlah fakta tersebut dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Kemampuan untuk melakukan sintesis tergantung kepada konsep yang dikuasai oleh peneliti, sehingga kemungkinan dapat menimbulkan hasil penafsiran yang berbeda satu sama lain. Menurut Gottschlak, penafsiran sejarah mempunyai tiga aspek penting, yaitu:

- a. Analisis-kritis yaitu menganalisis struktur intern (manusia, ruang, dan waktu), pola-pola hubungan antar fakta-fakta, gerak diinamika dalam sejarah, dan sebagainya.
- b. Historis-substantif yaitu menyajikan suatu uraian prosesual dengan dukungan fakta yang cukup sebagai ilustrasi suatu perkembangan.
- c. Sosial-Budaya yaitu memperhatikan manifestasi manusia dalam interaksi dan interrelasi social-budaya.

Gilbert J. Garraghan membagi interpretasi ke dalam lima jenis, yakni *interpretasi verbal*, *interpretasi teknis*, *interpretasi logis*, *interpretasi psikologis*, dan *interpretasi faktual*. *Interpretasi verbal* merupakan langkah penafsiran kata-kata yang diambil secara individual atau kelompok dalam sumber sejarah; *Interpretasi verbal* merupakan langkah penafsiran kata-kata yang diambil secara individual atau kelompok dalam sumber sejarah; *Interpretasi logis* artinya pemaknaan atau penafsiran didasarkan atas pemikiran logis; *Interpretasi psikologis* adalah usaha penafsiran untuk mengetahui makna dokumen berdasar pengaruh sifat psikis pembuat dokumen; *Interpretasi faktual* digunakan untuk menghadapi fakta dokumen yang tidak atau tanpa kata-kata.<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Nina Herlina, *Metode Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2008). hlm. 99.

#### **4. Historiografi**

Tahapan ini merupakan langkah terakhir dalam penelitian sejarah, setelah dilakukan penafsiran dengan hasil serangkaian fakta yang tersusun secara singkat. Maka dilakukanlah penulisan dari serangkaian fakta yang tersusun tersebut kemudian dikembangkan secara terperinci menjadi sebuah tulisan sejarah. Pada tahap ini, penulis dituntut untuk dapat mengkaitkan fakta yang ada secara logis dan sistematis agar menghasilkan tulisan yang baik dan benar. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Pada BAB I yaitu Pendahuluan, di dalamnya dibahas mengenai: A. Latar Belakang Masalah; B. Perumusan Masalah; C. Tujuan Penelitian; D. Manfaat Penelitian; E. Kerangka Pemikiran; F. Kajian Pustaka; G. Metode Penelitian yang meliputi tahapan Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi.

Pada Bab II yaitu Awal Pendirian dan Arah Pengembangan Organisasi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat, di dalamnya dibahas mengenai: A. Awal Pendirian Organisasi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat; B. Tujuan dan Orientasi Organisasi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat; C. Perkembangan Struktur dan Fungsi Organisasi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat; D. Kontribusi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat dalam Kehidupan Masyarakat.

Pada Bab III yaitu Pandangan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat tentang Kesetaraan Gender, di dalamnya dibahas mengenai: A. Kiprah Aisyiyah sebagai Organisasi Perempuan Muslim; B. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam; C. Pandangan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat tentang Kesetaraan Gender; D. Tantangan dan Hambatan dalam Memberdayakan Perempuan

Pada Bab IV yaitu Peran Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat dalam Pemberdayaan Politik Perempuan (1999-2019), yang di dalamnya dibahas mengenai: A. Perempuan dalam Politik di Era Reformasi; B. Perempuan dalam Sistem Politik Islam; C. Pandangan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat tentang Peran Politik Perempuan; D. Respon Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat terhadap Berbagai Isu dan Kebijakan; E. Peran Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat dalam Pemberdayaan Politik Perempuan (1999-2019); F. Kendala bagi

Keterlibatan Perempuan dalam Politik Praktis; G. Solusi bagi Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Politik.

Pada BAB V yaitu Penutup, di dalamnya diuraikan mengenai kesimpulan dari pembahasan ataupun jawaban dari perumusan masalah secara singkat dan jelas. Selain itu, dipaparkan juga saran untuk perbaikan ke depannya.

